

LAPORAN KINERJA Inspektorat Wilayah II 2023



Badan Pusat Statistik



LAPORAN KINERJA
Inspektorat Wilayah II
2023

Laporan Kinerja

Inspektorat Wilayah II 2023

ISBN: -

Katalog:

Ukura. Buku: 21cm x 29,7cm

Jumlah halaman: x+73

Naskah: Inspektorat Wilayah II

Penyuning: Inspektorat Wilayah II

Desain Kover: Inspektorat Wilayah II

Penerbit: Badan Pusat Staisik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Staisik

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Badan Pusat Statistik Tahun 2023. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Inspektorat Wilayah II kepada publik dan pemangku kepentingan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Sebagai unit pengawasan intern di Lingkungan BPS, kinerja Inspektorat Wilayah II harus dapat berkontribusi dan berkolaborasi dengan unit kerja lain dalam mendukung pencapaian visi dan misi BPS yang dijabarkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. Kontribusi yang dapat diberikan dari hasil pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Wilayah II diantaranya meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan meningkatkan penilaian Reformasi Birokrasi (RB).

Kami berharap Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Inspektorat Wilayah II selama tahun 2023 secara terperinci dan transparan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah II. Selain itu, semoga laporan kinerja ini dapat berguna untuk evaluasi dan demi peningkatan kinerja Inspektorat Wilayah II pada khususnya.

Jakarta, 13 Februari 2023

Inspektur Wilayah II

Endang Tri Wahyuningsih

D A F T A R I S I

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii
Ikhtisar Eksekutif	viii
Bab I Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
1.4 Sumber Daya Manusia Inspektorat Wilayah II	5
1.5 Potensi dan Permasalahan	7
1.6 Sistematika Penyajian Laporan	8
Bab II Perencanaan Kinerja	11
2.1 Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020-2024	11
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah II 2023	13
Bab III Akuntabilitas Kinerja	17
3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023	17
3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2023	25
3.3 Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021, dan 2023	25
3.4 Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2023	37
3.5 Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra 2020-2024	38
3.6 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja	41
3.7 Prestasi Tahun 2023	44
3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2023	46
3.9 Upaya Efisiensi Inspektorat Utama Tahun 2023	46
Bab IV Penutup	51
4.1 Tinjauan Umum	51
4.2 Tindak Lanjut/ Upaya Perbaikan	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian IKU Inspektorat Wilayah II Tahun 2023	ix
Tabel 2	Jumlah Pegawai Inspektorat Wilayah II Menurut Jabatan	7
Tabel 3	Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2020-2024	12
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023.....	14
Tabel 5	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2023	18
Tabel 6	Capaian IKS 1.1.1. Tahun 2023	19
Tabel 7	Capaian IKS 1.1.2. Tahun 2023	20
Tabel 8	Capaian IKS 1.1.3. Tahun 2023	21
Tabel 9	Capaian IKS 1.1.4. Tahun 2023	22
Tabel 10	Capaian IKS 1.2.1. Tahun 2023	24
Tabel 11	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2023.....	26
Tabel 12	Capaian IKS 1.1.1 Tahun 2020-2023	28
Tabel 13	Capaian IKS 1.1.2 Tahun 2020-2023	29
Tabel 14	Capaian IKS 1.1.3 Tahun 2020-2023	31
Tabel 15	Capaian IKS 1.1.4 Tahun 2020-2023	32
Tabel 16	Capaian IKS 1.1.5 Tahun 2020-2023	33
Tabel 17	Capaian IKS 1.2.1 Tahun 2020-2023	34
Tabel 18	Capaian IKS 1.2.2 Tahun 2020-2023	35
Tabel 19	Capaian IKS 1.2.3 Tahun 2020-2023	35
Tabel 20	Capaian IKS 1.2.4 Tahun 2020-2023	36
Tabel 21	Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023 terhadap Target Renstra Tahun 2023	37
Tabel 22	Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra	38
Tabel 23	Pagu dan Realisasi Anggaran 2023 menurut Sasaran Strategis.....	46
Tabel 24	Perbandingan Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Tahun 2023	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Junlah Pegawai Inspektorat Wilayah II Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023	5
Gambar 2	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Inspektorat Wilayah II Tahun 2022-2023	6
Gambar 3	Visi dan Misi Inspektorat Utama 2020-2024... ..	12
Gambar 4	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama.....	13
Gambar 5	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2023.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Susunan Organisasi Inspektorat Wilayah II	55
Lampiran 2	Target Kinerja pada Renstra Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024	56
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah II Tahun 2023	57
Lampiran 4	Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023 per Triwulan	58
Lampiran 5	Daftar Nama Satker yang Diaudit dan Ditindaklanjuti oleh Inspektorat Wilayah II tahun 2023.....	59
Lampiran 6	Nota Dinas Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2023	60
Lampiran 7	Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023 Satker BPS Prov/Kab/Kota di bawah Pembinaan Inspektorat Wilayah II.....	61

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Wilayah II sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Badan Pusat Statistik mempunyai peran yang signifikan untuk menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam menghasilkan data yang terpercaya dan berkualitas. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Wilayah II telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024.

Visi Inspektorat Wilayah II 2020-2024 adalah **“Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Wilayah II mempunyai tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis yaitu meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis pertama, meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Sasaran strategis kedua, mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Inspektorat Wilayah II memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang sama dengan Inspektorat Utama. Sedangkan indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat Wilayah II merupakan turunan dari IKU Inspektorat Utama BPS.

Inspektorat Wilayah II memiliki satu komponen dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yaitu pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Inspektorat Wilayah II. Adapun anggaran pada tahun 2023 di Inspektorat Wilayah II sebesar Rp1.009.657.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.005.120.939,00 (99,55%).

Dari 5 (lima) indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah II Tahun 2023, semua indikator kinerja terealisasi sesuai dan melebihi target kinerja yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Wilayah II.

Tabel 1. Capaian IKU Inspektorat Wilayah II Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Pengendalian dan Akutabiitas Kinerja Aparatur BPS				
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	96,67	103,33	106,89
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	80,18	81,23	101,31
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	96,19	98,76	102,67
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	82,54	91,01	110,26
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II	84,36	NA	NA
Rata-Rata Capaian Kinerja				105,28

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah II pada tahun 2023 memiliki rata-rata sebesar 105,28 persen, menurun sebesar 0,14 persen dari capaian tahun 2022 (105,42 persen). Analisis dan evaluasi atas pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Inspektorat Wilayah II tahun 2023 dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengetahui kinerja Inspektorat Wilayah II pada tahun 2023 dan selanjutnya dapat digunakan dalam membuat rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah II di masa mendatang.

The background features a light-colored, modern building facade with a grid of windows. Overlaid on this are large, semi-transparent geometric shapes in shades of orange and blue, with white diagonal lines, creating a dynamic, architectural feel.

BAB I **PENDAHULUAN**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 7 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik, tugas Inspektorat Wilayah II adalah melaksanakan pengawasan fungsional, yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Inspektorat Wilayah II memiliki tugas melakukan pengawasan fungsional yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2023 serta diselaraskan dengan Renstra 2020-2024.

Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan, Inspektorat Wilayah II terus berupaya meningkatkan kompetensi auditornya serta memperluas cakupan kegiatan pengawasannya. Berdasarkan Surat Perintah Inspektur Utama Nomor: B-001/08000/HK.420/01/2023 tanggal 2 Januari 2023, kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Wilayah II pada tahun 2023 terdiri dari Audit atas Pengelolaan Keuangan Negara (satker BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota); Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT); Audit Kinerja Tusi; Probity Audit Kinerja Kegiatan Sensus/Survei; Probity Audit Barang dan Jasa; Reviu Laporan Keuangan; Reviu Revisi Anggaran; Reviu Pengadaan Barang dan Jasa; Reviu Revisi DIPA/POK satker daerah; Reviu RKA KL; Reviu RK BMN; Reviu Kerjasama; Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); Telaah Sejawat; Monitoring Sistem Pengendalian Intern (SPI online); Reviu BMN; Pemantauan/Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan hasil audit Inspektorat Wilayah II, Pemantauan Kerjasama. Selain itu, Inspektorat Wilayah II juga memiliki tugas antara lain: menjadi penanggung jawab Liason Officer (LO) BPK/BPKP, Peningkatan Kapabilitas APIP, Kegiatan AAIFI, Standar Audit, Kode Etik, Piagam Audit, Penataan Peraturan Perundang-undangan (RB), Penataan dan Penguatan Organisasi (RB), dan Sistem Manajemen SDM (RB).

Pada awal tahun 2023, Inspektorat Wilayah II menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah II tahun 2023. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut, akan dimonitoring

setiap triwulanan dalam bentuk matrik rencana aksi dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (laporan capaian kinerja triwulanan) dan laporan kinerja tahunan.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18, disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran, akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Wilayah II kepada Inspektur Utama dan Kepala BPS atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran selama tahun 2023.

1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Kedudukan Inspektorat Wilayah II dalam struktur organisasi Badan Pusat Statistik sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektorat Utama dan Kepala BPS. Inspektorat Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur dengan jabatan Eselon II.

Tugas Inspektorat Wilayah II seperti tercantum pada BAB X Bagian keempat Pasal 104 dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2020 adalah melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara serta sebagian unit kerja BPS di Pusat.

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

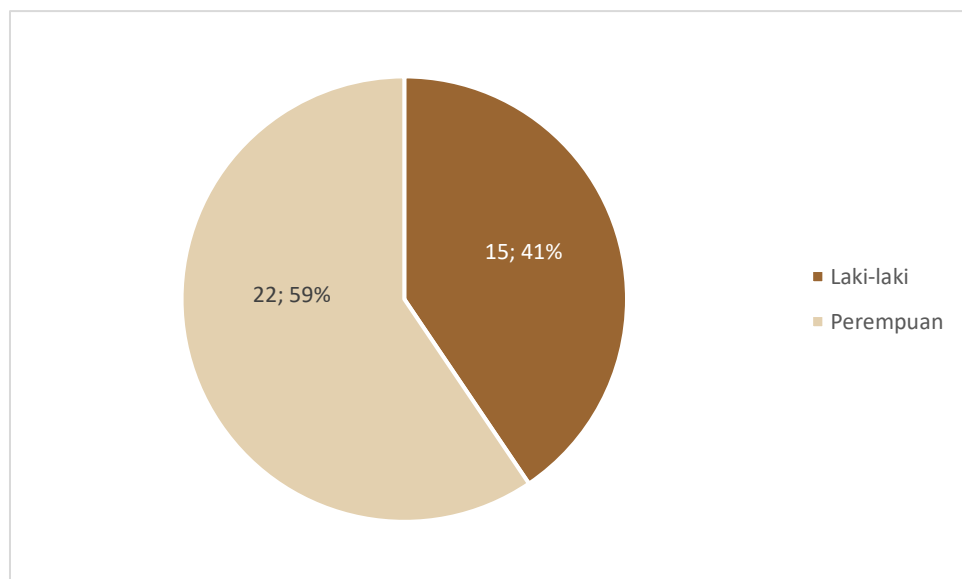
Fungsi Inspektorat Wilayah II sebagaimana tercantum pada BAB X Bagian keempat pasal 105 dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2020 yaitu:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di Wilayah II;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di Wilayah II.

1.4 Sumber Daya Manusia Inspektorat Wilayah II

Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah II adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Dari tahun ke tahun Inspektorat Wilayah II berusaha meningkatkan kapasitas SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah II tidak terdapat penambahan pegawai, sehingga jumlah pegawai Inspektorat Wilayah II pada tahun 2023 sama dengan jumlah pegawai tahun 2022, yaitu sebanyak 37 pegawai.

Jumlah pegawai Inspektorat Wilayah II pada tahun 2023 menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak daripada jumlah pegawai laki-laki, yaitu 22 orang pegawai perempuan berbanding 15 orang pegawai laki-laki.

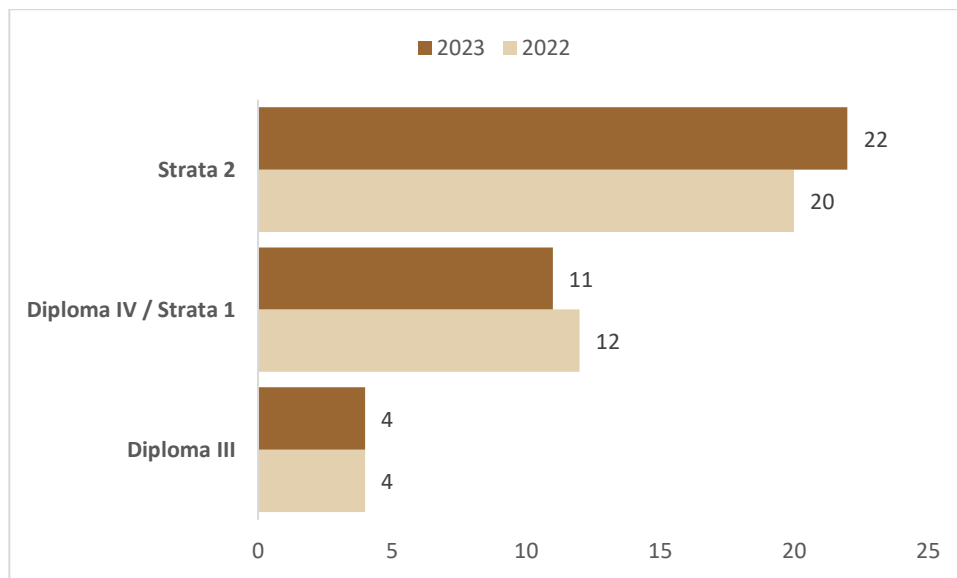


Gambar 1. Jumlah Pegawai Inspektorat Wilayah II Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

Komposisi pegawai di Inspektorat Wilayah II baik dilihat dari jenjang pendidikan maupun jabatan fungsionanya sebagai berikut :

a. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas SDM. Pegawai Inspektorat Wilayah II pada tahun 2023 yang memiliki tingkat pendidikan Diploma III sebanyak 4 orang. Pegawai yang memiliki pendidikan Diploma IV/S1 sebanyak 11 orang, menurun dari tahun 2022 dikarenakan terdapat 1 pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar S2. Hal ini sejalan dengan kenaikan jumlah pegawai yang memiliki pendidikan formal S2 sebanyak 2 orang, sehingga pada tahun 2023 pegawai Inspektorat Wilayah II yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 22 orang pegawai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan formal SDM Inspektorat Wilayah II sudah sangat baik. Adapun jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Inspektorat Wilayah II Tahun 2022-2023

b. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Jabatan Fungsional Auditor

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 7, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikelompokkan menurut kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang terdiri dari:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT);
- b. Jabatan Fungsional (JF); dan

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

c. Jabatan Administrasi (JA).

Pada Tahun 2023, di Inspektorat Wilayah II terdapat 1 orang Pimpinan Tinggi Pratama (Inspektur Wilayah II) dan 36 fungsional tertentu (35 orang fungsional auditor dan 1 orang fungsional arsiparis). Gambaran komposisi pegawai Inspektorat Wilayah II tahun 2023 menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Inspektorat Wilayah II Menurut Jabatan

No	Jabatan	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Inspektur Wilayah II	1	1
2	Fungsional Auditor	26	33
	a. Auditor Madya	3	9
	b. Auditor Muda	11	6
	c. Auditor Pertama	8	14
	c. Auditor Penyelia	1	1
	e. Auditor Terampil	3	3
3	Fungsional lainnya	0	1
	Arsiparis Pertama	0	1
4	Fungsional Umum	10	2
	Jumlah	37	37

1.5 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi berbagai potensi yang telah dimiliki oleh Inspektorat Wilayah II sebagai berikut:

1. Berbagai SOP dan Pedoman Pengawasan telah disusun dan masih perlu dilakukan reviu secara berkala;
2. Adanya hubungan yang baik antara sesama auditor maupun antara auditor dengan Inspektur baik secara formal maupun non formal;
3. Hasil Audit dan Evaluasi Inspektorat Wilayah II telah digunakan oleh berbagai pihak dalam hal perencanaan, monitoring dan evaluasi satkernya. Bahkan temuan yang berulang semakin berkurang.
4. Monitoring kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II telah menggunakan sistem, sebagian kegiatan telah ada monitoringnya berupa Dashboard.

Selain memiliki potensi, Inspektorat Wilayah II pun memiliki permasalahan dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

1. Pelaksanaan diklat teknis/fungsional selain masih bergantung dari undangan instansi pelaksana yaitu BPKP, juga bergantung dengan anggaran yang tersedia dan saat ini anggaran diklat berpusat di Pusdiklat serta Inspektorat Wilayah II tidak mempunyai kewenangan penuh dalam pelaksanaannya.
2. Permasalahan koordinasi di lingkungan internal Inspektorat Wilayah II yang dirasakan kurang optimal dan beban penugasan pengawasan yang semakin banyak serta ada yang di luar perencanaan karena adanya kegiatan BPS yang *ad hoc* dan perlu pengawalan oleh APIP.

1.6 Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja Inspektorat Wilayah II tahun 2021 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia di Inspektorat Wilayah II, potensi dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Wilayah II; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah II Tahun 2023.
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II tahun 2023, Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Inspektorat Wilayah II, Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II tahun 2023 terhadap Target Renstra 2020-2024 dan Realisasi Anggaran tahun 2023
- Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

The background features a light-colored, modern building facade with a grid of windows. Overlaid on this are large, semi-transparent geometric shapes in shades of orange and blue, with white diagonal lines, creating a dynamic, architectural feel.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020-2024

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Wilayah II sebagai bagian dari Inspektorat Utama BPS telah menetapkan pedoman kerja seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020-2024. Di dalam Renstra menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pokok selama periode lima tahunan. Tahun 2023 ini merupakan periode keempat dalam melaksanakan Renstra 2020-2024.

Visi Inspektorat Utama adalah “Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas”. Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Utama menempatkan diri sebagai mitra kerja dari seluruh satuan kerja/unit kerja di BPS untuk memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan BPS khususnya dalam penyelenggaraan statistik, dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

1. *Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi;*

“Inspektorat Utama terus berupaya meningkatkan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS melalui pengawasan yang lebih terprogram dan berbasis pada risiko (*risk based audit*). Penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Utama merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka pemberian keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan BPS khususnya penyelenggaraan statistik telah memenuhi standar yang ditetapkan dan telah sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif (3E)”.

2. *Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan;*

“Inspektorat Utama berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membangun ketaatan seluruh pihak di BPS terhadap peraturan perundang-undangan melalui berbagai kegiatan pengawasan intern, meliputi audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya. Inspektorat Utama memberikan keyakinan yang memadai bagi organisasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang yang berkualitas, transparan, dan akuntabel”.

3. *Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP;*

“Inspektorat Utama sebagai mitra kerja yang terpercaya wajib terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), assessment JFA, kursus, seminar, workshop, study banding, dan pelatihan di kantor sendiri (PKS)/sharing knowledge. Selain itu, perlu terus meningkatkan integritasnya sebagai APIP dengan penerapan nilai-nilai inti BPS dan kode etik auditor dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajibannya”.

VISI INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024	Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas	MISI INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024
		Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi
		Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan
TUJUAN	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	

Gambar 3. Visi dan Misi Inspektorat Utama 2020-2024

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Inspektorat Utama 2020-2024, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai yang memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	S.1 Meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
	S.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

Tujuan dan sasaran strategis pada tabel diatas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama

Inspektorat Wilayah II merupakan bagian dari Inspektorat Utama. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024 melekat pada Renstra Inspektorat Utama Tahun 2020-2024. Sehingga visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah II sama dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Inspektorat Utama.

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah II Tahun 2023

Pada awal tahun, ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Pengendalian dan Akutabiitas Kinerja Aparatur BPS			
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	96,67
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,18
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Persen	96,19
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	82,54
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II	Persen	84,36

Perjanjian Kinerja tahun 2023 merupakan pelaksanaan periode keempat dari Renstra 2020-2024. Target perjanjian kinerja 2023 sebagai komitmen untuk mencapai target Renstra 2023 yang sekaligus target kinerja jangka menengah. Keberhasilan pencapaian target-target tersebut menjadi tolak ukur kinerja Inspektorat Wilayah II dan memberi kontribusi signifikan pada kinerja Inspektorat Utama.

Realisasi dari target perjanjian kinerja dimonitoring setiap triwulanan yang dituangkan dalam Form Rencana Aksi (FRA). Hasil monitoring tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan capaian kinerja triwulanan. Laporan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target dalam PK menjadi tanggung jawab Inspektur Wilayah II kepada Inspektur Utama atas penggunaan anggaran Inspektorat Wilayah II.

The background features a light-colored, modern building facade with a grid of windows. Overlaid on this are large, stylized geometric shapes in shades of orange and blue, with white diagonal lines cutting through them. The text is centered in the middle of the page.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023 merupakan pencapaian dari indikator-indikator sasaran tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2023. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja.

3.1.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Menurut Tujuan

Inspektorat Wilayah II mempunyai satu tujuan dan dua sasaran strategis. Tujuannya yaitu “Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS”. Sedangkan sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS” yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran dan “Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel” yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran.

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023 merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2023. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Reviu PK Inspektorat Wilayah II Tahun 2023. Capaian kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

Indikator Kinerja Sasaran (IKS) pada Inspektorat Wilayah II sebanyak 5 (lima) IKS, 4 (empat) telah terealisasi dan memenuhi target yang telah ditetapkan, sedangkan satu IKS tidak ada realisasi, yaitu IKS 2.1 yang tidak ada realisasinya pada Tahun 2023 karena adanya perubahan mekanisme penilaian RB. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah:

Tabel 5. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				105,28
1.1 Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				105,28
1.1.1.Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	96,67	103,33	106,89
1.1.2.Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,18	81,23	101,31
1.1.3.Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Persen	96,19	98,76	102,67
1.1.4.Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	82,54	91,01	110,26
1.2 Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				NA
1.2.1 Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II	Persen	84,36	NA	NA
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja				105,28

Berdasarkan tabel diatas, capaian sasaran 1 (satu) Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS baru tercapai sebesar 105,28 persen sedangkan pada sasaran 2 (dua) Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel tidak terdapat nilai realisasi (terdapat perubahan mekanisme penilaian Reformasi Birokrasi). Empat Indikator Kinerja Sasaran (IKS) pada sasaran 1 (satu) telah memenuhi target, namun IKS 5 (lima) pada sasaran 2 (dua) tidak terdapat nilai realisasi. Selanjutnya akan dijabarkan capaian kinerja dari masing-masing sasaran beserta indikator kinerja pada setiap sasaran strategis.

Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS

Sasaran 1: Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS

Untuk sasaran strategis 1, diukur dengan rata-rata capaian empat IKS, dan didapatkan capaian kinerja sasaran sebesar 105,28 persen. Dengan demikian nilai capaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dikatakan berhasil. Secara rinci analisis dan evaluasi atas masing-masing indikator sasaran dijelaskan dibawah ini

IKS 1.1.1: Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)

Tabel 6. Capaian IKS 1.1.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1.Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	96,67	103,33	106,89

Indikator kinerja sasaran pertama pada sasaran strategis pertama adalah Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA. Indikator tersebut diukur dengan menghitung jumlah satuan/unit kerja yang memiliki temuan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA, dibagi dengan jumlah seluruh Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang diaudit dikalikan dengan 100 persen.

Target indikator persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa) pada tahun 2023 adalah 96,67 persen dengan realisasi sebesar 103,33 persen, sehingga capaian kinerjanya sebesar 106,89 persen. Satker yang diaudit oleh Inspektorat Wilayah II pada tahun 2023 sebanyak 31 satker, semua satker yang diaudit tidak memiliki penyimpangan kerugian negara lebih dari tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa). Pada saat perencanaan, satker yang akan diaudit sebanyak 30 satker, namun terdapat penambahan satu satker yaitu BPS Provinsi

Sumatera Utara sebagai audit pendahuluan sebelum pemeriksaan terinci BPK Tahun 2023. Penambahan tersebut berdasarkan persetujuan Inspektur Utama.

Berdasarkan hasil capaian kinerja bisa dilihat bahwa pencapaian telah mencapai target. Namun, dalam mencapai kinerja tersebut masih terdapat **kendala** yang harus dihadapi, yaitu:

1. Pelaksanaan pelaporan melewati batas waktu yang telah ditetapkan;
2. Keterlambatan pemenuhan dokumen audit karena kesibukan satker dalam pelaksanaan kegiatan Survei/Sensus saat desk audit;
3. Tumpang tindih dengan pengawasan lainnya.

Agar target indikator kinerja tahun 2023 dapat tercapai dan untuk dapat mengatasi kendala tersebut, maka Inspektorat Wilayah II melakukan beberapa upaya atau solusi. **Solusi** yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II antara lain:

1. Merevisi SOP Audit Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Mensosialisasikan SOP Audit Pengelolaan Keuangan Negara; dan
3. Penyusunan matriks pekerjaan auditor sebelum kegiatan pengawasan dilakukan tahun 2024.

Adapun upaya perbaikan/rencana tindak lanjut IKS 1.1 yaitu:

1. Menyusun revisi SOP Audit Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Sosialisasi SOP Audit Pengelolaan Keuangan Negara; dan
3. Perbaikan dalam penyusunan matriks pekerjaan auditor tahun 2024.

IKS 1.1.2: Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI

Tabel 7. Capaian IKS 1.1.2 Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.2.Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,18	81,23	101,31

Indikator kinerja sasaran kedua dari sasaran strategis pertama ini diukur dengan menghitung jumlah tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang sesuai dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK dikalikan dengan 100 persen. Pada tahun 2023, capaian kinerja indikator penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebesar 101,31

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

persen, dari target pada tahun 2023 sebesar 80,18 persen dan realisasi sebesar 81,23 persen. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja untuk IKS 1.1.2 Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI tercapai. Untuk mencapai kinerja tersebut, terdapat **kendala** yang dihadapi, yaitu informasi dari Kepala Auditorat II BPK awal tahun 2024, pembahasan tindak lanjut dari BPS masih dalam pembahasan di level Auditor Utama BPK, karena rekomendasi yang ditelaah selain temuan LK tahun 2022 juga LK tahun 2010-2021.

Solusi:

1. Membangun komunikasi secara berjenjang dalam internal BPS yang wajib menindaklanjuti dan dengan tim BPK;
2. Menyampaikan progress tindak lanjut kepada pimpinan; dan
3. Update dashboard Monitoring Tindak Lanjut hasil temuan atas pemeriksaan BPK.

Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut:

1. Rapat dengan pihak-pihak yang menindaklanjuti;
2. Komunikasi dengan tim BPK;
3. Membuat Nota Dinas penyampaian progress tindak lanjut dari Inspektur Utama ke Sekretaris Utama; dan
4. Penyempurnaan *Dashboard* Pemantauan TL.

IKS 1.1.3: Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II

Tabel 8. Capaian IKS 1.1.3 Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.3 Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Persen	96,19	98,76	102,67

Indikator kinerja sasaran ketiga dari sasaran strategis pertama ini diukur dengan menghitung jumlah tindak lanjut rekomendasi atas audit pengelolaan keuangan yang sesuai dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan Inspektorat Wilayah II dikalikan dengan 100 persen. Pada tahun 2023 terdapat 323 temuan/rekomendasi, sebanyak 319 rekomendasi telah

selesai ditindaklanjuti atau sebesar 98,76 persen. Capaian kinerja yang telah dicapai untuk indikator tersebut adalah sebesar 102,67 dari target sebesar 96,19 persen.

Namun, untuk mencapai target kinerja pada IKS “Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II” tersebut Inspektorat Wilayah II memiliki kendala dalam pelaksanaannya. **Kendala** yang dihadapi Inspektorat Wilayah II dalam menuntaskan tindak lanjut tersebut adalah terdapat rekomendasi hasil audit yang dilakukan pada TW I tahun 2023 yang belum sesuai dengan tindak lanjutnya yaitu BPS Pulau Morotai (keterkaitan penyelesaian tindak lanjut yang melibatkan pihak ketiga/penyedia).

Untuk mengatasi kendala tersebut, Inspektorat Wilayah II melakukan upaya atau **solusi** agar target indikator kinerja tahun 2023 dapat tercapai. Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II antara lain:

1. Membuat surat teguran ke BPS Pulau Morotai; dan
2. Menyusun SOP tindak lanjut hasil audit.

Upaya perbaikan pada tahun 2024 yaitu:

1. Mengirim surat teguran ke BPS Pulau Morotai; dan
2. Menyusun SOP tindak lanjut hasil audit.

IKS 1.1.4: Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

Tabel 9. Capaian IKS 1.1.4 Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.4. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	82,54	91,01	110,26

Indikator kinerja sasaran keempat dari sasaran strategis pertama ini diukur dengan menghitung jumlah Satker/Unit Kerja yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP berkategori B dibagi dengan jumlah Satker/Unit Kerja di Wilayah II yang dievaluasi dikalikan dengan 100 persen. Evaluasi implementasi SAKIP pada tahun 2023, sebanyak 172 satuan kerja memperoleh nilai evaluasi SAKIP berkategori B dari 178 satuan kerja BPS di bawah tanggungjawab Inspektorat

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

Wilayah II. Realisasi persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) sebesar 91,01 persen dari target pada tahun 2022 sebesar 82,54 persen, sehingga capaian kinerjanya sebesar 110,26 persen. Ini membuktikan bahwa untuk indikator tersebut telah mencapai target kinerja yang diperjanjikan. Dalam mencapai target yang telah diperjanjikan masih ditemukan **kendala** dalam prosesnya pencapaiannya. Berdasarkan informasi Surat Perintah Inspektur Utama Nomor 001/08000/HK420/01/2023, Evaluasi Implementasi SAKIP dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Wilayah I, dengan informasi sebagai berikut:

1. Waktu penyelesaian evaluasi Unit Kerja tidak bersamaan. Terdapat Tim Evaluasi yang tidak menyelesaikan target evaluasi satker tanggungjawab sampai 22 Desember 2023;
2. Panel antar tim yang tidak berjalan sesuai perencanaan;
3. LHE tidak terkirim tepat waktu. antara lain satuan kerja masih belum sepenuhnya memahami implementasi SAKIP. Untuk mengatasi kendala yang ada, upaya atau solusi yang dilakukan Inspektorat Wilayah II yaitu memberikan pembinaan dan pendampingan implementasi SAKIP kepada satker.

Solusi untuk IKS 1.1.4 yaitu:

1. Tim Koordinator membantu penyelesaian evaluasi untuk tim yang belum menyelesaikan evaluasinya; dan
2. Panel antar tim dilakukan oleh tim koordinator terbatas pada kriteria-kriteria tertentu.

Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut:

1. Ketua Tim Evaluasi menyusun LHE untuk di reviu oleh Auditor Madya.
2. Tim Evaluasi segera menyelesaikan evaluasi Unit Kerja Pusat.
3. Tim Menyusun:
 - a. Buku laporan evaluasi BPS Provinsi, (Januari s.d Februari 2024);
 - b. Buku laporan evaluasi BPS Kabupaten/Kota (Januari s.d Februari 2024); dan
 - c. Buku laporan evaluasi BPS Unit Kerja Pusat (Januari s.d Februari 2024).

Sasaran 2: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

IKS 1.2.1: Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II.

Tabel 10. Capaian IKS 1.2.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2.1 Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah II (%)	Persen	84,36	NA	NA

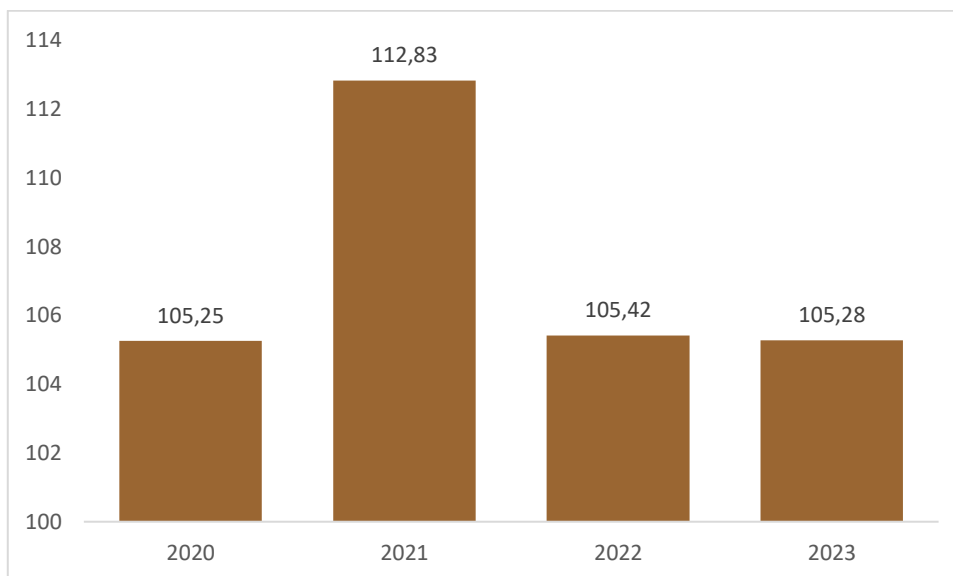
Indikator kinerja sasaran pertama dari sasaran strategis kedua ini diukur dengan menghitung nilai perolehan pilar penguatan pengawasan dari Tim Penilai Internal/Asesor dibagi dengan nilai maksimal pilar penguatan pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II dikalikan dengan 100 persen. Namun pada tahun 2023, penilaian Reformasi Birokrasi (RB) tidak dilaksanakan menurut pilar termasuk pilar penguatan pengawasan, namun dengan mekanisme baru yaitu dengan mekanisme “*double track*” yaitu RB general dan RB tematik. Sehingga IKS 1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah II (%) tahun 2023 tidak dapat diperoleh nilai.

Kendala: Berdasarkan informasi Surat Perintah Inspektur Utama Nomor 001/08000/HK420/01/2023, PMPRB dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah I. Adapun informasi yang diperoleh dari wilayah I untuk IKS 2.1 yaitu: belum ada keputusan tentang pengukuran IKS ini.

Solusi : Disepakati pada level Inspektorat Utama.

Upaya Perbaikan: jika dilihat dari mekanismenya, tidak ada upaya perbaikan untuk IKS ini.

3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2023



Gambar 5. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2023

Berdasarkan Gambar 5. rata-rata sasaran dan IKS telah tercapai dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,28 persen pada tahun 2023; sebesar 105,42 persen pada tahun 2022; sebesar 112,83 persen pada tahun 2021; dan sebesar 105,25 persen pada tahun 2020. Capaian kinerja tertinggi terdapat pada tahun 2021, namun demikian capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,14 persen. Penurunan tersebut tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan terdapat satu IKS, yaitu IKS 2.1 yang tidak ada realisasinya pada Tahun 2023 karena adanya perubahan mekanisme penilaian RB.

3.3. Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021, dan 2022

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2021 diukur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 dengan 2 sasaran strategis dan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan capaian kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022 dan 2023 diukur dengan menggunakan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 dengan 2 sasaran strategis

dan 2 IKU. Pengukuran capaian kinerja juga dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target masing-masing tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun yang bersangkutan. Hasil capaian kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2022 tertuang pada Tabel 11 berikut :

Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2020 – 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023		
		Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(9)	(10)	(11)
Tujuan : Meningkatkan Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS													
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS													
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	85	100	117,65	87	97,78	112,26	96,30	100	103,84	96,67	103,33	106,89
Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	75	74	98,67	80	80,31	100,39	80,11	80,52	100,51	80,18	81,23	101,31
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Persen	95	100	105,26	95	94,52	99,49	95,07	95,54	100,49	96,19	98,76	102,67
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori	Persen	70	74	105,71	75	86,52	115,36	82,01	97,75	119,19	82,54	91,01	110,26

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023		
		Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(9)	(10)	(11)
baik (minimal B)													
Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	95	100	105,26	95	100,00	105,26	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel													
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II	Persen	75	75	100,00	79	100,00	120,00	83,15	85,70	103,07	84,36	NA	NA
Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah keseluruhan)	Persen	11	11	100,00	15	32,02	120,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah keseluruhan)	Persen	1	1	100,00	1	1,69	120,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	68	78	114,71	60	78,26	120,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rata-rata Indikator Sasaran	Capaian			105,25			112,53			105,42			105,28

Berdasarkan tabel 11, rata-rata indikator sasaran tahun 2020 - 2023 telah tercapai dengan baik, meskipun ada Indikator Kinerja Sasaran yang berbeda karena adanya perubahan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024. Rata-rata capaian indikator sasaran pada tahun 2023 sebesar **105,28** persen. Penurunan capaian kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan yang disebabkan terdapat satu IKS, yaitu IKS 2.1 tidak ada realisasinya pada Tahun 2023 karena adanya perubahan mekanisme penilaian RB. Indikator Kinerja Sasaran (IKS) tahun 2023 dan tahun 2022 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, dimana jumlah IKS pada tahun 2023 dan 2022 sebanyak 5 (lima) IKS dengan 2 (dua) sasaran dan 1 (satu) tujuan . Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran (IKS) tahun 2021 dan 2020 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, dimana jumlah IKS pada tahun 2021 dan 2020 sebanyak 9 (sembilan) IKS dengan 2 (dua) sasaran dan 1 (satu) tujuan .

Tujuan: Meningkatkan Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS

Sasaran 1.1: Meningkatkan Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS

IKS 1.1.1: Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)

Tabel 12. Capaian IKS 1.1.1 Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023		
		Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	85	100	117,65	87	97,78	112,26	96,30	100	103,84	96,67	103,33	106,89

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan audit ialah “Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)”. Pada tahun 2023 capaian kinerja indikator ini sebesar 106,89 persen, hal ini mengalami kenaikan sebesar 3,05 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Berdasarkan hasil capaian kinerja bisa dilihat bahwa pencapaian telah mencapai target. Namun, dalam mencapai kinerja tersebut masih terdapat **kendala** yang harus dihadapi, yaitu:

1. Pelaksanaan pelaporan melewati batas waktu yang telah ditetapkan;
2. Keterlambatan pemenuhan dokumen audit karena kesibukan satker dalam pelaksanaan kegiatan Survei/Sensus saat desk audit;
3. Tumpang tindih dengan pengawasan lainnya.

Agar target indikator kinerja tahun 2023 dapat tercapai dan untuk dapat mengatasi kendala tersebut, maka Inspektorat Wilayah II melakukan beberapa upaya atau solusi. **Solusi** yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II antara lain:

1. Merevisi SOP Audit Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Mensosialisasikan SOP Audit Pengelolaan Keuangan Negara; dan
3. Penyusunan matriks pekerjaan auditor sebelum kegiatan pengawasan dilakukan tahun 2024.

Adapun upaya perbaikan/rencana tindak lanjut IKS 1.1 yaitu:

1. Menyusun revisi SOP Audit Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Sosialisasi SOP Audit Pengelolaan Keuangan Negara; dan
3. Perbaikan dalam penyusunan matriks pekerjaan auditor tahun 2024.

IKS 1.1.2 : Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI

Tabel 13. Capaian IKS 1.1.2 Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023		
		Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(9)	(10)	(11)
Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	75	74	98,67	80	80,31	100,39	80,11	80,52	100,51	80,18	81,23	101,31

Capaian indikator “Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI” dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami kenaikan. Capaian kinerja IKS ini pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,80 persen dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Peningkatan capaian kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2022 disebabkan:

1. Adanya pendampingan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK oleh Inspektorat Wilayah II kepada Satuan Kerja (Satker) dan Unit Kerja; serta
2. Monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK dipantau melalui dashboard monitoring tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK 2023.

Untuk mencapai target kinerja tersebut, terdapat **kendala** yang dihadapi, yaitu informasi dari Kepala Auditorat II BPK awal tahun 2024, pembahasan tindak lanjut dari BPS masih dalam pembahasan di level Auditor Utama BPK, karena rekomendasi yang ditelaah selain temuan LK tahun 2022 juga LK tahun 2010-2021.

Solusi:

1. Membangun komunikasi secara berjenjang dalam internal BPS yang wajib menindaklanjuti dan dengan tim BPK;
2. Menyampaikan progress tindak lanjut kepada pimpinan; dan
3. Update dashboard Monitoring Tindak Lanjut hasil temuan atas pemeriksaan BPK.

Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut:

1. Rapat dengan pihak-pihak yang menindaklanjuti;
2. Komunikasi dengan tim BPK;
3. Membuat Nota Dinas penyampaian progress tindak lanjut dari Inspektur Utama ke Sekretaris Utama; dan
4. Penyempurnaan *Dashboard* Pemantauan TL.

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

IKS 1.1.3: Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II

Tabel 14. Capaian IKS 1.1.13 Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023		
		Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(9)	(10)	(11)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS													
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS													
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Persen	95	100	105,26	95	94,52	99,49	95,07	95,54	100,49	96,19	98,76	102,67

Indikator “Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II” pada tahun 2023 memiliki capaian kinerja sebesar 102,67 persen. Capaian kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,18 persen dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 100,49 persen. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 3,18 persen, namun jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,59 persen. Kenaikan capaian pada tahun 2023 antara lain disebabkan karena adanya peningkatan koordinasi antara Auditor dan Auditan dalam penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil audit Inspektorat Utama oleh Auditan sehingga tindak lanjut dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan/kesepakatan yang telah ditandatangani Auditor dan Auditan.

Kendala yang dihadapi Inspektorat Wilayah II dalam menuntaskan tindak lanjut tersebut adalah terdapat rekomendasi hasil audit yang dilakukan pada TW I tahun 2023 yang belum sesuai dengan tindak lanjutnya yaitu BPS Pulau Morotai (keterkaitan penyelesaian tindak lanjut yang melibatkan pihak ketiga/penyedia).

Untuk mengatasi kendala tersebut, Inspektorat Wilayah II melakukan upaya atau **solusi** agar target indikator kinerja tahun 2023 dapat tercapai. Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II antara lain:

1. Membuat surat teguran ke BPS Pulau Morotai; dan
2. Menyusun SOP tindak lanjut hasil audit.

Upaya perbaikan pada tahun 2024 yaitu:

1. Mengirim surat teguran ke BPS Pulau Morotai; dan
2. Menyusun SOP tindak lanjut hasil audit.

IKS 1.1.4: Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

Tabel 15. Capaian IKS 1.1.4 Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023		
		Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(9)	(10)	(11)
Tujuan : Meningkatkan Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS													
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS													
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	70	74	105,71	75	86,52	115,36	82,01	97,75	119,19	82,54	91,01	110,26

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan evaluasi SAKIP ialah “Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)”. Capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dari 119,19 persen menjadi 110,26 persen. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan jumlah Satker yang mendapatkan nilai hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 dibawah “B” yang dinilai pada tahun 2023 oleh Tim Inspektorat Wilayah I.

Dalam mencapai target yang telah diperjanjikan masih ditemukan **kendala** dalam prosesnya pencapaiannya. Berdasarkan informasi dari Tim Inspektorat Wilayah I Surat Perintah Inspektur Utama Nomor 001/08000/HK420/01/2023, Evaluasi Implementasi SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah I. Adapun informasi yang diperoleh dari wilayah I untuk IKS 1.4 yaitu:

1. Waktu penyelesaian evaluasi Unit Kerja tidak bersamaan. Terdapat Tim Evaluasi yang tidak menyelesaikan target evaluasi satker tanggungjawab sampai 22 Desember 2023;

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

- Panel antar tim yang tidak berjalan sesuai perencanaan;
- LHE tidak terkirim tepat waktu. antara lain satuan kerja masih belum sepenuhnya memahami implementasi SAKIP. Untuk mengatasi kendala yang ada, upaya atau solusi yang dilakukan Inspektorat Wilayah II yaitu memberikan pembinaan dan pendampingan implementasi SAKIP kepada satker.

Solusi untuk IKS 1.1.4 yaitu

- Tim Koordinator membantu penyelesaian evaluasi untuk tim yang belum menyelesaikan evaluasinya;
- Panel antar tim dilakukan oleh tim koordinator terbatas pada kriteria-kriteria tertentu.

Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut:

- Ketua Tim Evaluasi menyusun LHE untuk di reviu oleh Auditor Madya.
- Tim Evaluasi segera menyelesaikan evaluasi Unit Kerja Pusat.
- Tim Menyusun:
 - Buku laporan evaluasi BPS Provinsi, (Januari s.d Februari 2024);
 - Buku laporan evaluasi BPS Kabupaten/Kota (Januari s.d Februari 2024); dan
 - Buku laporan evaluasi BPS Unit Kerja Pusat (Januari s.d Februari 2024).

IKS 1.1.5 : Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Tabel 16. Capaian IKS 1.1.5 Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023		
		Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS													
Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	95	100	105,26	95	100,0	105,26	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan reviu Laporan Keuangan ialah “Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP”. Capaian kinerja IKS 1.1.5 Tahun 2023 dan tahun 2022 tidak dapat dibandingkan karena capaian kinerja

tersebut diukur dengan menggunakan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

1.2 Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

IKS 1.2.1: Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan (sub pilar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/APIP)

Tabel 17. Capaian IKS 1.2.1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023		
		Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(9)	(10)	(11)
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II	Persen	75	75	100,00	79	100,00	120,00	83,15	85,70	103,07	84,36	NA	NA

Tahun 2023, Capaian kinerja untuk indikator “Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan (sub pilar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/APIP)” adalah tidak ada nilainya dikarenakan perubahan mekanisme penilaian RB yaitu dengan mekanisme “double track” yaitu RB general dan RB tematik. Sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2022. **Kendala:** Berdasarkan informasi Surat Perintah Inspektur Utama Nomor 001/08000/HK420/01/2023, PMPRB dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah I. Adapun informasi yang diperoleh dari wilayah I untuk IKS 2.1 yaitu: belum ada keputusan tentang pengukuran IKS ini.

Solusi : Disepakati pada level Inspektorat Utama.

Upaya Perbaikan: jika dilihat dari mekanisme penilaian, tidak ada upaya perbaikan untuk IKS ini.

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

IKS 1.2.2: Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah keseluruhan)

Tabel 18. Capaian IKS 1.2.2 Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023		
		Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(9)	(10)	(11)
Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah keseluruhan)	Persen	11	11	100,00	15	32,02	120,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Mulai tahun 2022, capaian kinerja untuk indikator Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah keseluruhan) tidak dapat dibandingkan karena capaian kinerja Inspektorat Wilayah II mulai Tahun 2022 diukur dengan menggunakan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, dimana IKS ini mulai tahun 2022 sudah tidak menjadi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Wilayah II.

IKS 1.2.3 : Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah keseluruhan)

Tabel 19. Capaian IKS 1.2.3 Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023		
		Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(9)	(10)	(11)
Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah keseluruhan)	Persen	1	1	100,00	1	1,69	120,00	-	-	-	NA	NA	NA

Capaian kinerja indikator “Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah keseluruhan)” mulai tahun 2022 tidak dapat dibandingkan karena capaian kinerja Inspektorat Wilayah II mulai tahun 2022 diukur dengan menggunakan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, dimana IKS ini sudah tidak menjadi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Wilayah II.

IKS 1.2.4: Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya

Tabel 20. Capaian IKS 1.2.4 Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023		
		Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)	Tar get	Rea lisasi	Capkin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(9)	(10)	(11)
Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	68	78	114,71	60	78,26	120,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Untuk mengukur kompetensi auditor, indikator yang digunakan adalah “Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya”. Mulai tahun 2022 tidak dapat dibandingkan karena capaian kinerja Inspektorat Wilayah II mulai tahun 2022 diukur dengan menggunakan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, dimana IKS ini mulai tahun 2022 sudah tidak menjadi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Wilayah II.

3.4 Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2023

Tabel 21. Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023 terhadap Target Renstra Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target Renstra 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS				105,28
1.1 Sasaran: Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				105,28
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)	Persen	96,67	103,33	106,89
Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,18	81,23	101,31
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Persen	96,19	98,76	102,67
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	82,54	91,01	110,26
1.2 Sasaran: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabels				NA
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah II (%)	Persen	84,36	NA	NA
Rata-Rata Capaian Kinerja				105,28

Berdasarkan tabel 21, seluruh indikator kinerja sasaran realisasinya melebihi target tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Renstra kecuali untuk IKS 2.1 (nilainya sudah tidak dapat diperoleh kembali dikarenakan adanya perubahan penilaian RB, sehingga capaian kerjanya tiap indikator sasaran telah optimal dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 105,28 persen.

3.5 Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra 2020-2024

Tabel 22. Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS				104,44
1.1 Sasaran: Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				104,44
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)	Persen	97,06	103,33	106,46
Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,30	81,23	101,12
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Persen	97,48	98,76	101,31
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	83,60	91,01	108,86
1.2 Sasaran: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				NA
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah II (%)	Persen	85,58	NA	NA
Rata-Rata Capaian Kinerja				104,44

Berdasarkan perbandingan Tabel 22, seluruh indikator kinerja sasaran realisasinya melebihi target akhir (tahun 2024) yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga capaian kerjanya tiap indikator sasaran telah optimal dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,44 persen.

Realisasi IKS 1.1 (Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa) tahun 2023 telah melampaui dari target akhir Renstra 2020-2024 yang ditetapkan, dimana capaiannya 106,46 persen. Dalam mencapai kinerja tersebut masih terdapat **kendala** yang dihadapi, yaitu:

1. Pelaksanaan pelaporan melewati batas waktu yang telah ditetapkan;

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

2. Keterlambatan pemenuhan dokumen audit karena kesibukan satker dalam pelaksanaan kegiatan Survei/Sensus saat desk audit;
3. Tumpang tindih dengan pengawasan lainnya.

Agar target indikator kinerja tahun 2023 dapat tercapai dan untuk dapat mengatasi kendala tersebut, maka Inspektorat Wilayah II melakukan beberapa upaya atau solusi. **Solusi** yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II antara lain:

1. Merevisi SOP Audit Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Mensosialisasikan SOP Audit Pengelolaan Keuangan Negara; dan
3. Penyusunan matriks pekerjaan auditor sebelum kegiatan pengawasan dilakukan tahun 2024.

Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut IKS 1.1 yaitu:

1. Menyusun revisi SOP Audit Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Sosialisasi SOP Audit Pengelolaan Keuangan Negara; dan
3. Perbaikan dalam penyusunan matriks pekerjaan auditor tahun 2024.

Capaian IKS 1.2 (Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI) tahun 2023 terhadap target akhir Renstra 2020-2024 sebesar 101,31 persen. Hal ini menunjukkan realisasi IKS ini telah melampaui target 2024 pada Renstra. Untuk mencapai target kinerja tersebut, terdapat **kendala** yang dihadapi, yaitu informasi dari Kepala Auditorat II BPK awal tahun 2024, pembahasan tindak lanjut dari BPS masih dalam pembahasan di level Auditor Utama BPK, karena rekomendasi yang ditelaah selain temuan LK tahun 2022 juga LK tahun 2010-2021.

Solusi:

1. Membangun komunikasi secara berjenjang dalam internal BPS yang wajib menindaklanjuti dan dengan tim BPK;
2. Menyampaikan progress tindak lanjut kepada pimpinan; dan
3. Update dashboard Monitoring Tindak Lanjut hasil temuan atas pemeriksaan BPK.

Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut:

1. Rapat dengan pihak-pihak yang menindaklanjuti;
2. Komunikasi dengan tim BPK;
3. Membuat Nota Dinas pemnyampaian progress tindak lanjut dari Inspektur Utama ke Sekretaris Utama; dan
4. Penyempurnaan *Dashboard* Pemantauan TL.

Realisasi IKS 1.3 (Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II) tahun 2023 telah melampaui target 2024 pada Renstra dengan capaian sebesar 102,67 persen. **Kendala** yang dihadapi Inspektorat Wilayah II dalam menuntaskan tindak lanjut tersebut adalah terdapat rekomendasi hasil audit yang dilakukan pada TW I tahun 2023 yang belum sesuai dengan tindak lanjutnya yaitu BPS Pulau Morotai (keterkaitan penyelesaian tindak lanjut yang melibatkan pihak ketiga/penyedia). Untuk mengatasi kendala tersebut, Inspektorat Wilayah II melakukan upaya atau **solusi** agar target indikator kinerja tahun 2023 dapat tercapai. Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II antara lain:

1. Membuat surat teguran ke BPS Pulau Morotai; dan
2. Menyusun SOP tindak lanjut hasil audit.

Upaya perbaikan pada tahun 2024 yaitu:

1. Mengirim surat teguran ke BPS Pulau Morotai; dan
2. Menyusun SOP tindak lanjut hasil audit.

Capaian IKS 1.4 (Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) sebesar 110,26 persen, artinya target 2024 pada Renstra 2020-2024 telah tercapai. Dalam mencapai target yang telah diperjanjikan masih ditemukan **kendala** dalam prosesnya pencapaiannya. Berdasarkan informasi Surat Perintah Inspektur Utama Nomor 001/08000/HK420/01/2023, Evaluasi Implementasi SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah I. Adapun informasi yang diperoleh dari wilayah I untuk IKS 1.4 yaitu:

1. Waktu penyelesaian evaluasi Unit Kerja tidak bersamaan. Terdapat Tim Evaluasi yang tidak menyelesaikan target evaluasi satker tanggungjawab sampai 22 Desember 2023;
2. Panel antar tim yang tidak berjalan sesuai perencanaan;
3. LHE tidak terkirim tepat waktu. antara lain satuan kerja masih belum sepenuhnya memahami implementasi SAKIP. Untuk mengatasi kendala yang ada, upaya atau solusi yang dilakukan Inspektorat Wilayah II yaitu memberikan pembinaan dan pendampingan implementasi SAKIP kepada satker.

Solusi untuk IKS 1.1.4 yaitu

1. Tim Koordinator membantu penyelesaian evaluasi untuk tim yang belum menyelesaikan evaluasinya;
2. Panel antar tim dilakukan oleh tim koordinator terbatas pada kriteria-kriteria tertentu.

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut:

1. Ketua Tim Evaluasi menyusun LHE untuk di reviu oleh Auditor Madya.
2. Tim Evaluasi segera menyelesaikan evaluasi Unit Kerja Pusat.
3. Tim Menyusun:
 - a. Buku laporan evaluasi BPS Provinsi, (Januari s.d Februari 2024);
 - b. Buku laporan evaluasi BPS Kabupaten/Kota (Januari s.d Februari 2024); dan
 - c. Buku laporan evaluasi BPS Unit Kerja Pusat (Januari s.d Februari 2024).

Realisasi IKS 2.1 (Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah II (%)) tidak ada dikarenakan perubahan mekanisme penilaian RB yaitu dengan mekanisme “*double track*” yaitu RB general dan RB tematik. Sehingga IKS 1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah II (%) tahun 2023 tidak dapat diperoleh nilai.

Kendala: Berdasarkan informasi Surat Perintah Inspektur Utama Nomor 001/08000/HK420/01/2023, PMPRB dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah I. Adapun informasi yang diperoleh dari wilayah I untuk IKS 2.1 yaitu: belum ada keputusan tentang pengukuran IKS ini.

Solusi : Disepakati pada level Inspektorat Utama.

Upaya Perbaikan: jika dilihat dari mekanisme penilaian, tidak ada upaya perbaikan untuk IKS ini.

3.6 Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah II selain melaksanakan tugas dan fungsi yang tercantum pada Surat Edaran Inspektur Utama Nomor B-001/08000/HK.420/01/2023 yang telah dirinci pada BAB I, juga melaksanakan probity audit Sensus Pertanian tahun 2023 (ST2023) dan pendampingan Administrasi ST2023. Adapun penjelasan kedua kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Probity Audit ST2023

Inspektorat Wilayah II melaksanakan probity audit ST2023, dimana Inspektorat Wilayah II menjadi koordinator untuk Bidang Administrasi. Inspektorat Wilayah II melaksanakan probity audit ST2023 bersama dengan Inspektorat Wilayah I (koordinator Bidang Kinerja) dan Inspektorat Wilayah III (koordinator Bidang Manajemen Risiko). Pelaksanaan probity audit ST2023 menggunakan *dashboard* Probity Audit ST2023. Probity audit ST2023 dilaksanakan pada tanggal 11 Juli sampai dengan 18 November 2023 dalam 9 gelombang dan 25 satker BPS Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Gelombang I (11 Juli – 17 Juli 2023)
 - 1) BPS Kabupaten Serang;
 - 2) BPS Kabupaten Kutai Kertanegara; dan
 - 3) BPS Kabupaten Pulau Morotai.
- b. Gelombang II (17 – 21 Juli 2023)
 - 1) BPS Kabupaten Kediri;
 - 2) BPS Kabupaten Pidie;
 - 3) BPS Kabupaten Sidenreng Rappang.
- c. Gelombang III (24 – 28 Juli 2023)
 - 1) BPS Kabupaten Sukabumi;
 - 2) BPS Kabupaten Manggarai Barat;
 - 3) BPS Kabupaten Karanganyar; dan
 - 4) BPS Kabupaten Grobogan.
- d. Gelombang IV (6 – 11 Agustus 2023)
 - 1) BPS Kabupaten Keerom
- e. Gelombang V (21 – 25 Agustus 2023)
 - 1) BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- f. Gelombang VI (11 – 16 September 2023)
 - 1) BPS Kota Pematang Siantar;
 - 2) BPS Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- g. Gelombang VII (22/23 – 28 Oktober 2023)\
- 1) BPS Kota Banjar;
- 2) BPS Kabupaten Sumba Timur;
- 3) BPS Kabupaten Kep. Sangihe; dan
- 4) BPS Kabupaten Banyumas.
- h. Gelombang VIII (30 Oktober – 4 November 2023)
 - 1) BPS Kabupaten Magelang;
 - 2) BPS Kabupaten Bandung;
 - 3) BPS Kabupaten Banyuwangi; dan
 - 4) BPS Kabupaten Lampung Tengah.
- i. Gelombang IX (13 – 18 November 2023)
 - 1) BPS Kabupaten Ciamis;

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

- 2) BPS Kabupaten Cianjur;
- 3) BPS Kabupaten Kampar.

Output dari kegiatan probity ST2023 adalah Laporan Hasil Probity Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Probity Audit ST2023.

2. Pendampingan ST2023 dilaksanakan sebagai bentuk *consulting* khusus pada administrasi ST2023. Pendampingan tersebut bertujuan untuk:
 - a. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses pengelolaan keuangan dan barang TA 2023 telah sesuai dengan prosedur dan kriteria yang distandarkan;
 - b. Memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap ketidaksesuaian praktik dengan kriteria yang distandarkan;
 - c. Membantu tatakelola pengarsipan pengeluaran anggaran dalam rangka persiapan pemenuhan permintaan dokumen BPK RI; dan
 - d. Memberikan saran perbaikan.

Pendampingan ST2023 dilaksanakan pada Bulan November dan Desember 2023 pada 21 Satker BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dalam 3 gelombang sebagai berikut:


- a. Gelombang I (20 -24 November 2023)
 - 1) BPS Kabupaten Bireun;
 - 2) BPS Kabupaten Indramayu;
 - 3) BPS Kabupaten Sleman;
 - 4) BPS Kabupaten Garut;
 - 5) BPS Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - 6) BPS Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Gelombang II (27 November – 1 Desember 2023)
 - 1) BPS Kabupaten Gowa;
 - 2) BPS Kabupaten Bogor;
 - 3) BPS Kabupaten Brebes;
 - 4) BPS Kabupaten Malang;
 - 5) BPS Kabupaten Minahasa Selatan;
 - 6) BPS Kabupaten Mandailing Natal;
 - 7) BPS Kabupaten Deli Serdang;
 - 8) BPS Provinsi DKI Jakarta;
 - 9) BPS Kabupaten Kep. Seribu; dan

- 10) BPS Kota Jakarta Selatan.
- c. Gelombang III (4 – 8 Desember 2023)
 - 1) BPS Kabupaten Labuhan Batu Utara;
 - 2) BPS Kota Pematang Siantar;
 - 3) BPS Kota Banjar;
 - 4) BPS Kabupaten Kubu Raya; dan
 - 5) BPS Kabupaten Bekasi.

Output dari kegiatan pendampingan ST2023 adalah saran perbaikan administrasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Administrasi ST2023.

3.7 Prestasi Tahun 2023

Pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah II telah memperoleh nilai hasil evaluasi Sakip unit kerja tertinggi di Lingkungan Sekretariat Utama.



BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-039/08000/PW.100/02/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 2 (dua) lembar
 Hal : Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja BPS Tahun 2022


Jakarta, 02 Februari 2023

Yth,
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat;
 3. Direktur Politeknik Statistika STIS;
 di
 Tempat

Sesuai dengan amanat Permen PAN & RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Utama sebagai APUP bertugas untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada unit kerja BPS. Seluruh rangkaian evaluasi tahun 2022 untuk unit kerja BPS telah selesai dilaksanakan, untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Rata-rata hasil evaluasi implementasi SAKIP untuk unit kerja BPS tahun 2022 adalah sebesar 67,70, naik sebesar 5,56 poin dibanding rata-rata tahun 2021 sebesar 62,16;
- Hasil evaluasi implementasi SAKIP tiap unit kerja sebagaimana terlampir digunakan sebagai sumber data pengisian capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama pada "Hasil Pemilaian SAKIP oleh Inspektorat" untuk Politeknik Statistika STIS dan Pusatdata BPS;
- Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP tiap unit kerja akan disampaikan kemudian oleh Inspektorat Wilayah terkait;
- Tim SAKIP unit kerja saudara agar mempelajari dan menindaklanjuti catatan LHE tersebut untuk perencanaan dan perbaikan implementasi SAKIP yang akan datang;
- Apresiasi yang tinggi terhadap seluruh jajaran Unit Kerja BPS atas komitmen dan kerja keras yang konstan dalam meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Inspektorat Utama,

 Akhmad Jaelani

Tembusan:
 Kepala BPS

*Dokumen ini telah distandarisasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Elektronik dan Riset Digital (BRN) BSSN

Jl. Sisinga No. 64, Jakarta 10115, Kode Pos 10115, Telp. (021) 3641785, 3642284, 3610231/4, Fax. (021) 3657746
 Homepage: bps.go.id E-mail: bps@bps.go.id

-2-

Lampiran
 Nomor : B-039/08000/PW.100/02/2023
 Tanggal : 02 Februari 2023

**Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP
 Unit Kerja BPS Tahun 2022**

Unit Kerja	2021		2022	
	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
2000 Sekretariat Utama	36,19	C	68,86	B
2100 Biro Perencanaan	54,47	CC	67,25	B
2200 Biro Keuangan	60,07	B	63,95	B
2300 Biro Sumber Daya Manusia	52,67	CC	66,58	B
2400 Biro Humas dan Hukum	50,67	CC	64,48	B
2500 Biro Umum	47,69	C	63,10	B
2600 Pusat Pendidikan dan Pelatihan	74,14	BB	75,31	BB
2700 Politeknik Statistika STIS	72,05	BB	72,55	BB
3000 Kedepulan Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	60,22	B	61,19	B
3100 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	60,83	B	61,30	B
3200 Direktorat Diseminasi Statistik	62,34	B	70,88	BB
3300 Direktorat Sistem Informasi Statistik	64,11	B	70,55	BB
4000 Kedepulan Bidang Statistik Sosial	60,06	B	60,88	B
4100 Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	60,85	B	67,61	B
4200 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	64,57	B	64,89	B
4300 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	58,11	CC	64,71	B
5000 Kedepulan Bidang Statistik Produksi	53,12	CC	66,26	B
5100 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	57,13	CC	66,03	B
5200 Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	63,64	B	64,79	B

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

-3-

Unit Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
5300	Direktorat Statistik Industri, Pertambangan dan Pengalihan, Energi, dan Konstruksi	63,46	B	63,93	B
6000	Kedepuyan Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	67,88	B	61,69	B
6100	Direktorat Statistik Distribusi	59,88	CC	62,27	B
6200	Direktorat Statistik Harga	58,46	CC	54,08	CC
6300	Direktorat Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata	67,92	B	69,89	B
7000	Kedepuyan Bidang Neraca dan Analisis Statistik	66,17	B	66,72	B
7100	Direktorat Neraca Produksi	70,04	BB	71,08	BB
7200	Direktorat Neraca Pengeluaran	66,11	B	69,96	B
7300	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	69,79	B	70,83	BB
8000	Inspektorat Utama	68,35	B	74,25	BB
8100	Inspektorat Wilayah I	75,44	BB	75,16	BB
8200	Inspektorat Wilayah II	72,94	BB	75,64	BB
8300	Inspektorat Wilayah III	69,83	B	74,92	BB



Selain itu, pada tahun 2023 juga Inspektorat Wilayah II memperoleh piagam penghargaan dari internal BPS atas kepatuhan penyampaian LHKPN dan SPT tahun 2022 di Lingkungan Badan Pusat Statistik.



Inspektorat Wilayah II juga telah berkontribusi secara aktif dalam mendukung pencapaian prestasi BPS tahun 2023, antara lain mempertahankan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan tahun 2022, memperoleh nilai “BB” pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), dan nilai kapabilitas APIP Inspektorat Utama BPS Tahun 2023 berada pada Level 3 dengan skor 3,30.

3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Wilayah II didukung oleh dana yang bersumber dari APBN. Anggaran Keuangan yang diajukan dan ditetapkan untuk Inspektorat Wilayah II telah didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Wilayah II tahun 2020-2024 dan telah disusun secara realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Dalam Pengelolaan/penatausahaan anggaran telah menggunakan rasio kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Pagu yang diberikan ke Inspektorat Wilayah II untuk menjalankan fungsinya selama tahun 2023 adalah sebesar Rp1.009.657.000,00 dengan realisasi mencapai 99,33 persen atau sebesar Rp1.002.875.000,00.

Tabel 23. Pagu dan Realisasi Anggaran 2023 Menurut Sasaran Strategis

Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(3)	(4)	(5)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS	1.009.657.000,00	1.005.120.939,00	99,55
SS 1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	1.009.657.000,00	1.005.120.939,00	99,55
SS 1.2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	-	-	NA

3.9 Upaya Efisiensi Inspektorat Utama Tahun 2023

Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong K/L untuk meningkatkan efisiensi penganggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang dihasilkan. Berdasarkan tabel 24 diatas, dapat dilihat bahwa Sasaran Strategis 1.1. meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 105,28 sedangkan realisasi anggaran sebesar 99,55% sehingga efisiensi anggaran yang dihasilkan sebesar 4,49%.

Tabel 24. Perbandingan Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS	105,28	1.009.657.000,00	1.005.120.939,00	99,55	4,49
SS 1.1. Meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	105,28	1.009.657.000,00	1.005.120.939,00	99,55	4,49
SS 1.2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	NA	NA	NA	NA	NA

Secara total ataupun menurut sasaran strategis 1.1. nilai efisiensi anggaran tahun 2023 yang dikelola oleh Inspektorat Wilayah II sebesar 4,49 persen dibandingkan dengan capaian kinerja yang diraih oleh Inspektorat Wilayah II. Sasaran Strategis 1.2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel tidak terdapat nilai realisasi dikarenakan adanya perubahan mekanisme penilaian RB. Secara anggaran pun SS 1.2. tidak terdapat anggarannya. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pengawasan, yaitu audit revidu laporan keuangan, pendampingan pembangunan gedung, dan pendampingan pemeriksaan BPK.

Adapun beberapa efisiensi yang dilakukan antara lain :

1. Pelaksanaan audit dilakukan secara *desk* audit terlebih dahulu sebelum pelaksanaan *field* audit, sehingga menghemat anggaran dan waktu pada saat *field*;
2. Adanya integrasi kegiatan audit yang dilaksanakan bersamaan oleh auditor, sehingga anggaran dan waktu pelaksanaan audit lebih efisien. Misal, perjalanan kegiatan audit dilaksanakan bersamaan dengan revidu Laporan Keuangan;
3. Beberapa kegiatan seperti Revidu Laporan Keuangan, Evaluasi SAKIP dan Evaluasi ZI dilakukan dengan *desk evaluation*;
4. Pelaksanaan Diklat/Sosialisasi dilakukan secara *on-line*;
5. Penghematan dalam penggunaan kertas dan alat tulis lainnya, dengan cara membuat template surat dinas dan menggunakannya untuk seluruh kegiatan pengawasan;
6. Penghematan penggunaan listrik ketika istirahat dan waktu jam kerja selesai serta menghindari penggunaan listrik yang berlebihan apabila hanya satu orang saja yang bekerja hingga malam, mematikan PC, laptop dan lampu bila sudah tidak digunakan; dan

7. Beralih menggunakan fasilitas *softcopy* dalam mengirimkan pelaporan, sehingga membatasi penggunaan tinta printer dan juga mesin fotokopi, sehingga menghemat tinta printer/mesin fotocopy.

The background features a light-colored, modern building facade with a grid of windows. Overlaid on this are large, semi-transparent geometric shapes in shades of orange and blue, with white diagonal lines cutting through them. The text is centered in the middle of the page.

BAB IV

PENUTUP

BAB 4

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah II tahun 2023 telah tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 105,28 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Wilayah II dapat memenuhi seluruh target Perjanjian Kinerja tahun 2023. Inspektorat Wilayah II menyadari akan berbagai keterbatasan, sehingga diperlukan identifikasi area yang masih memerlukan penyempurnaan. Sangat diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja yang terus dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II agar indikator kinerja sasaran semuanya dapat tercapai, terutama pada persentase Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Inspektorat Utama selama tahun 2023 antara lain:

1. Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah II tahun 2023 telah tercapai dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II tahun 2023. Rata-rata capaian kinerja Inspektorat Wilayah II sebesar 105,28 persen. Dari 5 (lima) IKS Inspektorat Wilayah II, 4 (empat) telah terealisasi dan memenuhi target yang telah ditetapkan, sedangkan satu IKS tidak ada realisasi, yaitu IKS 2.1 yang tidak ada realisasinya pada Tahun 2023 karena adanya perubahan mekanisme penilaian RB.
2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Wilayah II didukung oleh dana yang bersumber dari APBN. Pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah II memiliki pagu sebesar Rp1.009.657.000,00 dengan realisasi mencapai 99,55 persen atau sebesar Rp1.005.120.939,00.

4.2. Tindak Lanjut/Upaya Perbaikan

Sebagai bentuk perbaikan dalam rangka pencapaian target IKU Inspektorat Wilayah II yang disajikan dalam Renstra 2020-2024 di masa mendatang, maka ditindaklanjuti yang dapat dilakukan di tahun mendatang antara lain:

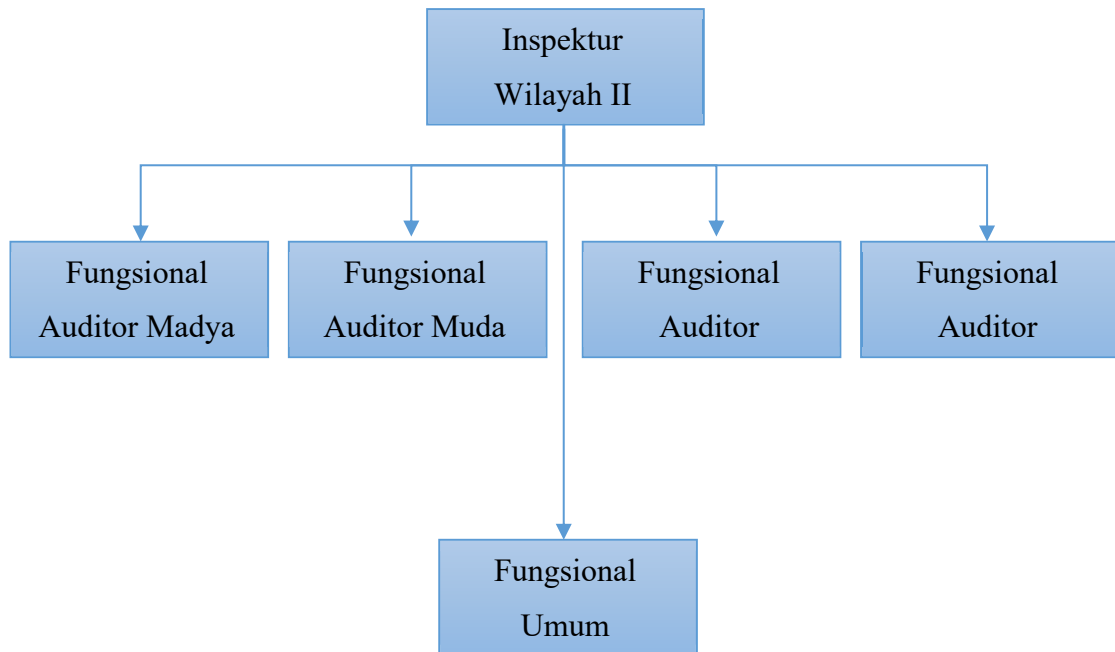
1. Revisi SOP Audit Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Sosialisasi SOP Audit Pengelolaan Keuangan Negara;

3. Matriks pekerjaan auditor tahun 2024.
4. Rapat dengan pihak-pihak yang menindaklanjuti;
5. Komunikasi dengan tim BPK;
6. Nota Dinas pemnyampaian progress tindak lanjut dari Inspektur Utama ke Sekretaris Utama;
7. *Dashboard* Pemantauan TL yang telah di-*update*.
8. Surat teguran ke BPS Pulau Morotai;
9. SOP tindak lanjut hasil audit.
10. Ketua Tim Evaluasi menyusun LHE untuk di reviu oleh Auditor Madya.
11. Tim Evaluasi segera menyelesaikan evaluasi Unit Kerja Pusat.
12. Tim Menyusun Evaluasi Sakip:
 - a. Buku laporan evaluasi BPS Provinsi, (Januari s.d Februari);
 - b. Buku laporan evaluasi BPS Kabupaten/Kota (Januari s.d Februari);
 - c. Buku laporan evaluasi BPS Unit Kerja Pusat (Januari s.d Februari).

The background features a light-colored, modern building facade with a grid of windows. Overlaid on this are several large, semi-transparent geometric shapes in shades of orange and blue, arranged in a dynamic, overlapping pattern. The word "LAMPIRAN" is centered in a bold, blue, sans-serif font.

LAMPIRAN

Susunan Organisasi Inspektorat Wilayah II



Lampiran 2

Target Kinerja pada Renstra Inspektorat Wilayah II Tahun 2020 - 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Inspektorat Wilayah II						
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)	85,00	87,00	96,30	96,67	97,06
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	75,00	80,00	80,11	80,18	80,30
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	95,00	95,00	95,07	96,19	97,48
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	70,00	75,00	82,01	82,54	83,60
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah II (%)	75,00	79,00	83,15	84,36	85,58

Perjanjian Kinerja Inspektor Wilayah II Tahun 2023

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT WILAYAH II
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Endang Tri Wahyuningsih MM
Jabatan : Inspektor Wilayah II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Akhmad Jaelani, M.Si.
Jabatan : Inspektor Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drs. Akhmad Jaelani, M.Si.
NIP. 19630621 198601 1 001

Surabaya, 19 Januari 2022
Pihak Pertama

Ir. Endang Tri Wahyuningsih MM
NIP. 19650923 199003 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT WILAYAH II

Tujuan/Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)
Tujuan 1. Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS			
Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	96,30
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,11
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Persen	95,07
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	Persen	82,01
Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah II (%)	Persen	83,15

Kegiatan

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II

Anggaran

Rp. 1.210.578.000,-

Pihak Kedua

Drs. Akhmad Jaelani, M.Si.
NIP. 19630621 198601 1 001

Surabaya, 19 Januari 2022
Pihak Pertama

Ir. Endang Tri Wahyuningsih MM
NIP. 19650923 199003 2 002

Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023 per Triwulan

Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)	Persen	TW I	53,33	66,67	120,00
			TW II	76,67	76,67	100,00
			TW III	90,00	103,33	114,81
			TW IV	96,67	103,33	106,89
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah II atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
			TW II	0,00	0,00	0,00
			TW III	0,00	0,00	0,00
			TW IV	80,18	81,23	101,31
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II	Persen	TW I	51,90	53,98	104,00
			TW II	76,19	73,36	96,28
			TW III	89,52	91,51	102,22
			TW IV	96,19	98,76	56,12
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
			TW II	0,00	0,00	0,00
			TW III	0,00	0,00	0,00
			TW IV	82,54	91,01	110,26
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00	
		TW II	0,00	0,00	0,00	
		TW III	0,00	0,00	0,00	
		TW IV	84,36	0,00	0,00	

**Daftar Satker yang Diaudit dan Ditindaklanjuti Tahun 2023
Inspektorat Wilayah II**

No	Satker Objek Audit
(1)	(2)
1	BPS Kota Jakarta Pusat
2	BPS Kota Jakarta Selatan
3	BPS Kota Jakarta Timur
4	BPS Provinsi DKI Jakarta
5	BPS Kabupaten Bandung
6	BPS Kabupaten Bandung Barat
7	BPS Kabupaten Purwakarta
8	BPS Provinsi Jawa Barat
9	BPS Kabupaten Labuhan Batu
10	BPS Kota Bogor
11	BPS Kota Depok
12	BPS Kabupaten Labuhan Batu Selatan
13	BPS Kabupaten Mesuji
14	BPS Kabupaten Tanggamus
15	BPS Kabupaten Way Kanan
16	BPS Kota Gunungsitoli
17	BPS Kabupaten Halmahera Barat
18	BPS Kabupaten Halmahera Selatan
19	BPS Kabupaten Pulau Morotai
20	BPS Kabupaten Indragiri Hulu
21	BPS Kabupaten Kuantan Singingi
22	BPS Kabupaten Landak
23	BPS Kabupaten Melawi
24	BPS Kota Dumai
25	BPS Kabupaten Barru
26	BPS Kabupaten Kepulauan Selayar
27	BPS Kabupaten Pinrang
28	BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
29	BPS Kabupaten Labuhan Batu Utara
30	BPS Kota Pematang Siantar
31	BPS Provinsi Sumatera Utara

Lampiran 6

Nota Dinas Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2023

BADAN PUSAT STATISTIK
INSPEKTORAT UTAMA

2

NOTA DINAS
NOMOR 4/08200/PW.040/2024

Demikian capaian kinerja progres pemantauan triwulan IV tahun 2023 ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Yth. : Kepala Bagian Umum Inspektorat Utama
Dari : Inspektur Wilayah II
Hal : Progres Capaian Kinerja Triwulan IV 2023
Tanggal : 17 Januari 2024



Ir. Endang Tri Wahyuningsih
MM

Bersama ini kami sampaikan progres pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai berikut:

1. Tim Pemantauan Tindak Lanjut Inspektorat Utama dengan Tim Pemantau Tindak Lanjut BPK melaksanakan pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk periode semester I dan II Tahun Anggaran 2023 sebanyak 380 temuan dengan 762 rekomendasi senilai Rp18.172.904.152,86 dan USD. 216.837,46.
2. Berdasarkan hasil pembahasan dengan tim BPK posisi pemantauan tindak lanjut sampai dengan Triwulan IV 2023 adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa total rekomendasi yang dipantau adalah sebanyak: 762 rekomendasi
 - 2) Rekomendasi yang statusnya telah sesuai berdasarkan berita acara risalah semester I 2022 adalah sebesar 568 telah sesuai dan 19 rekomendasi statusnya tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.
 - 3) Pada tahun 2023 telah dilakukan pembahasan dengan tim BPK atas rekomendasi yang belum sesuai sebanyak 175 rekomendasi. BPS pada tahun 2023 telah menindaklanjuti 175 rekomendasi.
 - 4) Berdasarkan hasil pembahasan dengan Tim Pemantau Tindaklanjuti BPK sebanyak 32 rekomendasi dinyatakan sesuai. (Kertas Kerja Risalah terlampir).
 - 5) Total capaian kinerja pemantauan tindak lanjut Triwulan untuk BPS adalah:
 $(619/762) \times 100 \% = 81,23\%$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BS-E), BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BS-E), BSSN

Lampiran 7

**Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023
Satker BPS Prov/Kab/Kota di bawah Pembinaan Inspektorat Wilayah II**

No	Kode Wilayah dan Satuan Kerja	Nilai 2023	Predikat 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1200 BPS Provinsi Sumatera Utara	75,95	BB
2	1201 BPS Kabupaten Nias	67,65	B
3	1202 BPS Kabupaten Mandailing Natal	72,95	BB
4	1203 BPS Kabupaten Tapanuli Selatan	70,10	BB
5	1204 BPS Kabupaten Tapanuli Tengah	60,05	B
6	1205 BPS Kabupaten Tapanuli Utara	74,90	BB
7	1206 Toba Samosir	71,45	BB
8	1207 Labuhan Batu	70,25	BB
9	1208 Asahan	69,50	B
10	1209 Simalungun	67,55	B
11	1210 Dairi	67,55	B
12	1211 Karo	72,95	BB
13	1212 Deli Serdang	70,85	BB
14	1213 Langkat	75,20	BB
15	1214 Nias Selatan	66,80	B
16	1215 Humbang Hasundutan	62,75	B
17	1216 Pakpak Bharat	75,20	BB
18	1217 Samosir	68,70	B
19	1218 Serdang Bedagai	69,05	B

laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

No	Kode Wilayah dan Satuan Kerja	Nilai 2023	Predikat 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
20	1219 Kab. Batu Bara	73,70	BB
21	1220 Padang Lawas Utara	69,05	B
22	1221 Padang Lawas	71,15	BB
23	1222 Labuhan Batu Selatan	72,20	BB
24	1223 Labuhan Batu Utara	72,65	BB
25	1271 Sibolga	68,45	B
26	1272 Tanjung Balai	69,95	B
27	1273 Pematang Siantar	64,65	B
28	1274 Tebing Tinggi	69,05	B
29	1275 Medan	69,30	B
30	1276 Binjai	65,00	B
31	1277 Padang Sidempuan	74,45	BB
32	1278 Gunung Sitoli	69,35	B
33	1400 Riau	77,20	BB
34	1401 Kuantan Singingi	76,00	BB
35	1402 Indragiri Hulu	63,65	B
36	1403 Indragiri Hilir	71,40	BB
37	1404 Pelalawan	74,00	BB
38	1405 Siak	67,25	B
39	1406 Kampar	72,60	BB
40	1407 Rokan Hulu	72,05	BB
41	1408 Bengkalis	69,05	B

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

No	Kode Wilayah dan Satuan Kerja	Nilai 2023	Predikat 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
42	1409 Rokan Hilir	69,45	B
43	1410 Kepulauan Meranti	68,00	B
44	1471 Pekanbaru	65,90	B
45	1473 Dumai	74,75	BB
46	1800 Lampung	78,25	BB
47	1801 Lampung Barat	59,75	CC
48	1802 Tanggamus	66,20	B
49	1803 Lampung Selatan	64,40	B
50	1804 Lampung Timur	68,75	B
51	1805 Lampung Tengah	69,65	B
52	1806 Lampung Utara	64,05	B
53	1807 Way Kanan	60,35	B
54	1808 Tulang Bawang	69,75	B
55	1809 Pesawaran	68,90	B
56	1810 Pringsewu	68,30	B
57	1811 Mesuji	72,05	BB
58	1812 Tulangbawang Barat	70,55	BB
59	1871 Kota Bandar Lampung	70,15	BB
60	1872 Kota Metro	65,00	B
61	3100 DKI Jakarta	76,25	BB
62	3101 Adm. Kepulauan Seribu	63,30	B
63	3171 Jakarta Selatan	61,95	B

laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

No	Kode Wilayah dan Satuan Kerja	Nilai 2023	Predikat 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
64	3172 Jakarta Timur	70,70	BB
65	3173 Jakarta Pusat	63,80	B
66	3174 Jakarta Barat	66,20	B
67	3175 Jakarta Utara	69,50	B
68	3200 Jawa Barat	76,00	BB
69	3201 Bogor	68,35	B
70	3202 Sukabumi	71,90	BB
71	3203 Cianjur	60,50	B
72	3204 Bandung	75,35	BB
73	3205 Garut	71,00	BB
74	3206 Tasikmalaya	66,80	B
75	3207 Ciamis	74,90	BB
76	3208 Kuningan	70,40	BB
77	3209 Cirebon	63,35	B
78	3210 Majalengka	74,75	BB
79	3211 Sumedang	67,10	B
80	3212 Indramayu	54,95	CC
81	3213 Subang	64,40	B
82	3214 Purwakarta	65,15	B
83	3215 Karawang	64,20	B
84	3216 Bekasi	70,40	BB
85	3217 Kab. Bandung Barat	67,55	B

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

No	Kode Wilayah dan Satuan Kerja	Nilai 2023	Predikat 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
86	3271 Kota Bogor	66,80	B
87	3272 Kota Sukabumi	60,80	B
88	3273 Kota Bandung	61,70	B
89	3274 Kota Cirebon	66,65	B
90	3275 Kota Bekasi	66,20	B
91	3276 Kota Depok	70,10	BB
92	3277 Kota Cimahi	62,90	B
93	3278 Kota Tasikmalaya	75,10	BB
94	3279 Kota Banjar	65,75	B
95	6100 Kalimantan Barat	76,45	BB
96	6101 Sambas	69,05	B
97	6102 Bengkayang	70,70	BB
98	6103 Landak	64,55	B
99	6104 Pontianak/mempawah	66,20	B
100	6105 Sanggau	72,95	BB
101	6106 Ketapang	75,50	BB
102	6107 Sintang	68,70	B
103	6108 Kapuas Hulu	68,75	B
104	6109 Sekadau	72,80	BB
105	6110 Melawi	75,20	BB
106	6111 Kab. Kayong Utara	71,40	BB
107	6112 Kubu Raya	67,25	B

laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

No	Kode Wilayah dan Satuan Kerja	Nilai 2023	Predikat 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
108	6171 Kota Pontianak	70,10	BB
109	6172 Kota Singkawang	71,80	BB
110	5100 Bali	77,95	BB
111	5101 Jembrana	73,60	BB
112	5102 Tabanan	75,50	BB
113	5103 Badung	71,45	BB
114	5104 Gianyar	75,55	BB
115	5105 Klungkung	74,05	BB
116	5106 Bangli	76,45	BB
117	5107 Karang Asem	74,20	BB
118	5108 Buleleng	72,40	BB
119	5171 Kota Denpasar	71,90	BB
120	5200 Nusa Tenggara Barat	78,40	BB
121	5201 Lombok Barat	77,00	BB
122	5202 Lombok Tengah	74,45	BB
123	5203 Lombok Timur	72,95	BB
124	5204 Sumbawa	75,40	BB
125	5205 Dompu	73,40	BB
126	5206 Bima	74,75	BB
127	5207 Sumbawa Barat	75,85	BB
128	5208 Lombok Utara	73,10	BB
129	5271 Kota Mataram	75,20	BB

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

No	Kode Wilayah dan Satuan Kerja	Nilai 2023	Predikat 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
130	5272 Kota Bima	75,50	BB
131	7100 Sulawesi Utara	75,70	BB
132	7101 Bolaang Mongondow	65,45	B
133	7102 Minahasa	57,95	CC
134	7103 Kepulauan Sangihe	65,30	B
135	7104 Kepulauan Talaud	68,15	B
136	7105 Minahasa Selatan	66,20	B
137	7106 Minahasa Utara	71,05	BB
138	7108 Siau Tagolandang Biaro	71,60	BB
139	7171 Kota Manado	72,95	BB
140	7172 Kota Bitung	75,20	BB
141	7173 Kota Tomohon	70,65	BB
142	7174 Kota Kotamobagu	73,85	BB
143	Bolaang Mongondow Utara	71,45	BB
144	7300 Sulawesi Selatan	77,50	BB
145	7301 Selayar	69,05	B
146	7302 Bulukumba	69,95	B
147	7303 Bantaeng	72,95	BB
148	7304 Jeneponto	72,35	BB
149	7305 Takalar	69,20	B
150	7306 Gowa	73,70	BB
151	7307 Sinjai	69,50	B

laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

No	Kode Wilayah dan Satuan Kerja	Nilai 2023	Predikat 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
152	7308 Maros	60,05	B
153	7309 Pangkajene dan Kepulauan	62,60	B
154	7310 Barru	64,10	B
155	7311 Bone	68,45	B
156	7312 Soppeng	73,65	BB
157	7313 Wajo	67,85	B
158	7314 Sidenreng Rappang	63,00	B
159	7315 Pinrang	70,65	BB
160	7316 Enrekang	68,30	B
161	7317 Luwu	71,90	BB
162	7318 Tana Toraja	65,70	B
163	7322 Luwu Utara	71,75	BB
164	7325 Luwu Timur	68,30	B
165	7326 Toraja Utara	68,90	B
166	7371 Kota Makasar	70,10	BB
167	7372 Kota Pare Pare	70,10	BB
168	7373 Kota Palopo	73,40	BB
169	8200 Maluku Utara		B
170	8201 Halmahera Barat		B
171	8202 Halmahera Tengah		CC
172	8203 Kepulauan Sula		CC
173	8204 Halmahera Selatan		CC

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

No	Kode Wilayah dan Satuan Kerja	Nilai 2023	Predikat 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
174	8205 Halmahera Utara		B
175	8206 Halmahera Timur		CC
176	8207 Pulau Morotai		C
177	8271 Kota Ternate		CC
178	8272 Kota Tidore Kepulauan		CC

Sampel Reviu LK Tahun 2022 di Lingkungan Inspektorat Wilayah II

	Nama Satker
1.	BPS Provinsi Sumatera Utara
2.	Wilayah Sumatera Utara
3.	BPS Kota Medan
4.	BPS Kabupaten Deli Serdang
5.	BPS Kabupaten Karo
6.	BPS Kabupaten Asahan
7.	BPS Kabupaten Nias
8.	BPS Kabupaten Serdang Bedagai
9.	BPS Kabupaten Langkat
10.	BPS Provinsi Riau
11.	Wilayah Riau
12.	BPS Kota Pekanbaru
13.	BPS Kabupaten Kampar
14.	BPS Provinsi Lampung
15.	Wilayah Lampung
16.	BPS Kabupaten Lampung Tengah
17.	BPS Kota Bandar Lampung
18.	BPS Kabupatem Lampung Timur
19.	BPS Provinsi DKI Jakarta
20.	Wilayah DKI Jakarta
21.	BPS Kota Jakarta Pusat
22.	BPS Kota Jakarta Utara

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II 2023

	Nama Satker
23.	BPS Kota Jakarta Timur
24.	BPS Kota Jakarta Barat
25.	BPS Kota Jakarta Selatan
26.	BPS Kabupaten Kepulauan Seribu
27.	BPS Provinsi Jawa Barat
28.	Wilayah Jawa Barat
29.	BPS Kota Bandung
30.	BPS Kota Bekasi
31.	BPS Kabupaten Garut
32.	BPS Kabupaten Bandung
33.	BPS Kabupaten Sukabumi
34.	BPS Provinsi Bali
35.	Wilayah Bali
36.	BPS Kota Denpasar
37.	BPS Kabupaten Badung
38.	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat
39.	Wilayah Nusa Tenggara Barat
40.	BPS Kabupaten Lombok Timur
41.	BPS Provinsi Kalimantan Barat
42.	Wilayah Kalimantan Barat
43.	BPS Kabupaten Sintang
44.	BPS Kabupaten Ketapang
45.	BPS Provinsi Maluku Utara
46.	Wilayah Maluku Utara
47.	BPS Kabupaten Halmahera Selatan
48.	BPS Kabupaten Halmahera Utara

	Nama Satker
49.	BPS Provinsi Sulawesi Selatan
50.	Wilayah Sulawesi Selatan
51.	BPS Kota Makassar
52.	BPS Kabupaten Gowa
53.	BPS Kabupaten Bone
54.	BPS Kabupaten Wajo
55.	BPS Kabupaten Maros
56.	BPS Provinsi Sulawesi Utara
57.	Wilayah Sulawesi Utara
58.	BPS Kota Manado
59.	BPS Kabupaten Bolaang Mongondow
60.	BPS Kabupaten Minahasa Selatan
61.	BPS Kabupaten Lombok Tengah
62.	Settama

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id